BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan yang melintasi batasan-batasan negara. Hubungan ini sering di sebut sebagai hubungan transnasional karena batas-batas kedaulatan suatu negara seolah-olah telah hilang atau dilangar oleh hubungan yang ada, hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi-organisasi internasional yang sifatnya lintas batas.

Mengetahui hakikat dari hubungan antara aktor dalam percaturan hubungan internasional, maka kita harus membedah apa yang disebut interaksi internasional. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya hubungan tersebut merupakan suatu bentuk interaksi internasional.

Menurut Charles Mc Clelland, dalam Perwita dan Yani, mendefenisikan bahwa hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan releven yang mengelilingi interaksi (Perwita & Yani, 2005:4).

Secara terminologi, Hubungan Internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan

segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pada awal keberadaannya, pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *high politic* dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis dan Wolfe, 2004: 24).

Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara–negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan meliputi segala seni hubungan internasional di antara berbagai negara di dunia.Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktor yang melewati batas-batas negara.*The Dictionary of World Politic*s mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang di gunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.

Seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani untuk mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yaitu:

> “Tujuan dasar hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berjuwud kerjasama,

> pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi dalam organisasi internasional"(Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Sementara dalam perkembangannya, pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh aktor pemerintah maupun oleh aktor non-pemerintah (Rudy, 2003: 2). Dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks.

Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (Plano, 2000: 115).

Hubungan Internasional yang pada awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003: 51).

Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan antara negara saja melainkan juga aktor-aktor lain yang juga mempunyai peranan berpengaruh dalam hubungan internasional.Aktor-aktor lain tersebut misalnya organisasi internasional, *multinational corporations* (MNCs), organisasi lingkungan, kelompok-kelompok teroris, yang semuanya merupakan bagian dari politik dunia. Interaksi yang kompleks dan melintas batas negara itu membuat batasan-batasan politik tidak lagi menjadi penghalang efektif dalam hubungan internasional. Sebagai gambaran umum perkembangan hubungan internasional dari tahun 1940-an sampai akhir 1990an.

2.1.2 Organisasi Internasional

2.1.2.1 Pengertian Organisasi Internasional

Selama masa tahun 1920 sampai 1930-an, studi hubungan internasional mulai dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa konflik dapat dikelola, dan dapat diselesaikan, jikalau diciptakan suatu aturan main atau tata tertib hukum dengan didukung oleh perangkat organisasi seperti organisasi internasional (Sitepu, 2011: 14).

Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dalam bukunya "Administrasi dan Organisasi Internasional" sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati

> bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 2009: 3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009: 3).

Pendefinisian Organisasi Internasional dengan membaginya ke dalam tiga pendekatan berdasarkan tingkat komparasinya. Pertama, Organisasi Internasional dapat dirumuskan ke dalam terminologi/istilah/atau dimensi tujuannya. Kedua, Organisasi Internasional dapat dirumuskan dengan berdasarkan pada kelembagaannya. Ketiga, Organisasi Internasional didekati dengan berdasarkan kepada prosesnya (Coloumbis & Wolfe dalam Sitepu, 2011: 137).

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 91).

T. May Rudy memberikan penggolongan terperinci mengenai organisasi inter nasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal yaitu, sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi: Organisasi internasional antarpemerintah (*intergovernmental organization/IGO)* dan organisasi internasional non-pemerintahan (*nongovernmental organization/NGO*).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri), bidang bea cukai, perdagangan internasional dan lain-lain.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: Organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: Global–umum, global-khusus,regional-umum dan regional–khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): Organisasi supranasional dan organisasi kerjasama.
7. Bentuk dan pola kerjasama: Kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
8. Fungsi organisasi: Organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya

hanya melaksanakan kegitan teknis secara administratif; dan organisasi peradilan yaitu: organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Rudy, 2005: 7-10).

Menurut Clive Archer, organisasi internasional, seminim-minimnya harus memiliki 3 karakteristik berikut ini:

1. Keanggotaan: Organisasi internasional menggambarkan adanya keanggotaan sekurang-kurangnya dari dua negara yang berdaulat.
2. Tujuan: Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang merepresentasin keinginan bersama setiap anggota.
3. Struktur: Sebuah organisasi harus mempunyai struktur formal untuk menjalankan kegiatan mereka.

Jadi pada kesimpulannya, Archer mendefinsikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Sebuah organisasi formal, memiliki struktur yang berkesinambungan yang disusun atas persetujuan antar anggota (pemerintah ataupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama seluruh anggota (Archer, 2001: 33).

Setiap organisasi internasional pasti memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu.

2.1.2.2 *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui keberadaan organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang makin banyak jumlahnya.

Organisasi non-pemerintah dapat bersifat organisasi internasional yang disebut INGO (*International Non-Governmental Organization)* dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut NGO (*Non-Governmental Organization*)saja. Perbedaannya hanya pada keangggotaan organisasi, mitra kerjasama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya.

Non-Governmental Organizations (NGO) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (*non-profit making purposes*). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong berkembangnya NGO. NGO memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut:

1. Inisiatif sendiri (*Private Initiative*), merupakan kenyataan yang dilakukan secara spontan yang terlihat di dalam lingkungan internasional, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah (negara). NGO juga

merekrut individu-individu yang tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah maupun *Intergovernmental Organizations* (IGO).

2. Spontanitas (*Spontanity*), dimana pada umumnya NGO dibentuk oleh sekelompok orang-orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara maupun negara-bangsa tidak mampu mewujudkan aspirasi maupun keinginan masyarakat.
3. Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja dari suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga individu-individu yang ada mampu berperan dinamis di dalam lingkungan internasional (Merle, 2001: 308-309).

Kriteria persyaratan bagi INGO menurut *The Union of International Association*, adalah:

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat atau berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekedar hubungan bilateral (antara dua negara), atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada tiga negara.
2. Keanggotaannya harus terbuka, mencakup individu-individu serta kelompok-kelompok di wilayah atau negara yang termasuk dalam ruang lingkup organisasi tersebut, dengan sekurang-kurangnya tiga negara.
3. Anggaran dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan atau pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala atau

periodik, dengan tata cara pemilihan yang disusun sedemikian rupa guna menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi hanya oleh orang-orang dari satu negara saja.

4. Pendanaan atau pembiayaan pokok (substansial) bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan dari sekurang-kurangnya tiga negara (Rudy, 2005: 20).

2.1.2.3 Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita & Yani, 2005: 95).

Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai hal yang menunjukan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara stuktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi (Perwita & Yani, 2005: 31).

Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, *peacekeeping operation* dan lain-lain (Perwita & Yani, 2005: 27).

Sedangkan Menurut Leroy Bennet dalam buku *InternationalOrganization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang

telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan (*role*) dapat di artikan sebagai berikut:

> "Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi.Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)" (Perwita & Yani, 2005: 30).

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial.Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial dan kategori keanggotaan organisasi (Perwita & Yani, 2005: 31).

2.1.3 Kerjasama Internasional

2.1.3.1 Pengertian Kerjasama Internasional

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal mencari makan, melawan bahaya dan menanggulangi bencana serta melanjutkan keturunan.

Pada awalnya kelompok manusia ini hidup dari hasil perburuan kelompoknya, setelah sumber buruan habis, maka mereka pindah ke lokasi lain dengan cara hidup nomaden. Kemudian sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka mulai hidup secara menetap pada satu tempat tertentu dan mereka mulai

mengenal bagaimana beternak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antarkelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang atau sekelompok kecil orangnya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009: 65-66).

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi kelompok yang lebih besar juga merupakan suatu bentuk organisasi pada zaman dahulu. Kemudian dari sinilah mulai berkembang menjadi kerajaan atau negara sebagai perwujudan dari kelompok manusia yang lebih tertib dan teratur sebagaimana persyaratan sebagai suatu organisasi. Kemudian kerajaan atau negara dengan kerajaan atau negara lain saling berhubungan yang pada mulanya adalah hubungan perdagangan yang lama kelamaan berkembang serta meluas ke bidang-bidang lain seperti kebudayaan, politik, militer, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, terdapat keadaan yang memudahkan pencapaian tujuan masing-masing dan dalam konteks hubungan inilah sering terjadi benturan kepentingan

diantara negara yang berhubungan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, yang dalam sejarah dunia telah terbukti beberapa kali bahkan beratus kali terjadi peperangan antar bangsa (Rudy, 2009: 66-67).

Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari, seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional (Martin, 2007: 11).

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2005: 3).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003: 2). Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005 : 33).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations. Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan ‘objektif’ dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara maka perlunya suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam konstelansi hubungan internasional dewasa ini merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak dari negara lain.

2.1.3.2 Kerjasama Bilateral

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian;
2. Tukar menukar Duta Besar;
3. Kunjungan kenegaraan.

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008: 85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002: 15-16).

Karena dalam penelitian ini meneliti mengenai dua negara yang berinteraksi, maka peneliti akan membahas mengenai perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah negara untuk

mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2003: 127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

2.1.4 Pendidikan Dalam Studi Hubungan Internasional

Konteks pendidikan dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkna kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seperti isu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkungan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang terjadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (Asrudin, 2009: 34).

Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Indonesia, yaitu pendidikan.karena

pendidikan merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik.

Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional. Seperti yang disebutkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) Menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi internasional melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka penghormatan universal lebih lanjut untuk keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bersama dengan kebebasan dasar yang diproklamirkan dalam Piagam PBB.

Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Ini menunjukkan sebuah hasil perkembangan menuju ke modernisasi produk sejarah dari tiga peristiwa penting dalam pusat Perang Dunia II. Pertama adalah kemunculan Amerika Serikat sebagai negara adi daya. Di tahun 1950-an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia. Ketiga ada disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia. Ketiga hal tersebut memberikan pandangan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya

membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan perang dunia ke II. Pasca perang dunia ke II, negara-negara maju tidak lagi menggunakan konflik fisik untuk membangun kekuatan tapi lebih kepada pengembangan pendidikan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara lain. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik bahkan hal keagamaan seperti *fatwa* sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik (Salim & Azra, 2003: 168).

Pendidikan sebagai usaha sadar memerlukan tujuan, tanpa tujuan,pelaksanaan pendidikan akan tidak teratur. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan hasil yang di harapkan dalam proses pendidikan tersebut.

Hal ini bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka baik hukum dan politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang baik serta untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan. Pendidikan adalah alat yang ampuh dimana orang dewasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dan anak-anak dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara**.**

Tujuan pendidikan mengarah pada kondisi yang diharapkan setelah terjadinya proses pendidikan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan hidup seseorang dan kehendak negara tempat ia hidup. Pandangan hidup manusia tentang tujuan

pendidikan berbeda dengan tujuan pendidikan yang di anut kaum kapitalis misalnya. Tujuan pendidikan suatu negara berbeda pula dengan tujuan pendidikan di negara lain.

Pendidikan yang berkualitas seperti yang dikemukakan Dody dan Ace Suryadi ada tiga macam, yaitu :

1. Menetapkan tujuan pendidikan yang bermutu : tujuan tersebut harus tampak, empiris, dan terukur, hal ini di karenakan ilmu itu harus logis dan empiris.
2. Sumber tujuan pendidikan : tujuan pendidikan bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan pandangan hidup masyarakat dan masyarakat lainnya walaupun tujuan pendidikan di berbagai negara itu berbeda-beda, ada satu tujuan yang disepakati, yaitu manusia cerdas, terampil, dan menjadi warga negara yang baik, kehendak negara dan agama bisa dijadikan sebagai sumber bagi tujuan pendidikan.
3. Klasifikasi tujuan pendidikan : dalam teori ilmu pendidikan, ada lima kategori tujuan pendidikan yaitu tujuan umum, tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga pendidikan, tujuan kurikuler, dan tujuan khusus. Semua tujuan tersebut mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu (Dody & Suryadi, 2013 : 47-49).

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sektor pendidikan menjadi salah satu modal yang paling

utama dalam proses pembagunan suatu negara sesuai dengan proses perkembangan pendidikan di suatu negara sesuai dengan pengimplementasian program sistem pendidikan dan kurikulum yang dapat menjamin proses pendidikan yang mampu berikan suatu perubahan yang betul–betul berpihak pada masyarakat atau warga negaranya.

Sedangkan menurut Wayne & Miskel menjelaskan bahwa mutu atau kualitas pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. Demikian mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu perbaikan proses pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan (Wayne & Miskel, 2001: 15).

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Menurut Admodiwirio, peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orangtua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi otonom

diberikan peluang untuk mengolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan (Admodiwirio, 2000: 5-6).

Margono berpendapat agar mutu atau kualitas pendidikan yang baik dapat tercapai, maka mutu tersebut harus didukung oleh sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah "sekolah yang secara keseluruhan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)". Pendapat ini cukup beralasan, karena terlalu banyak pengelolaan sekolah, yang mengabaikan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, sehingga hasilnya pun akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi guna meraih peluang dalam berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi kondisi global dimana sekolah diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mengembangkan fungsinya (Margono, 2005: 25).

2.2 Kerangka Pemikiran

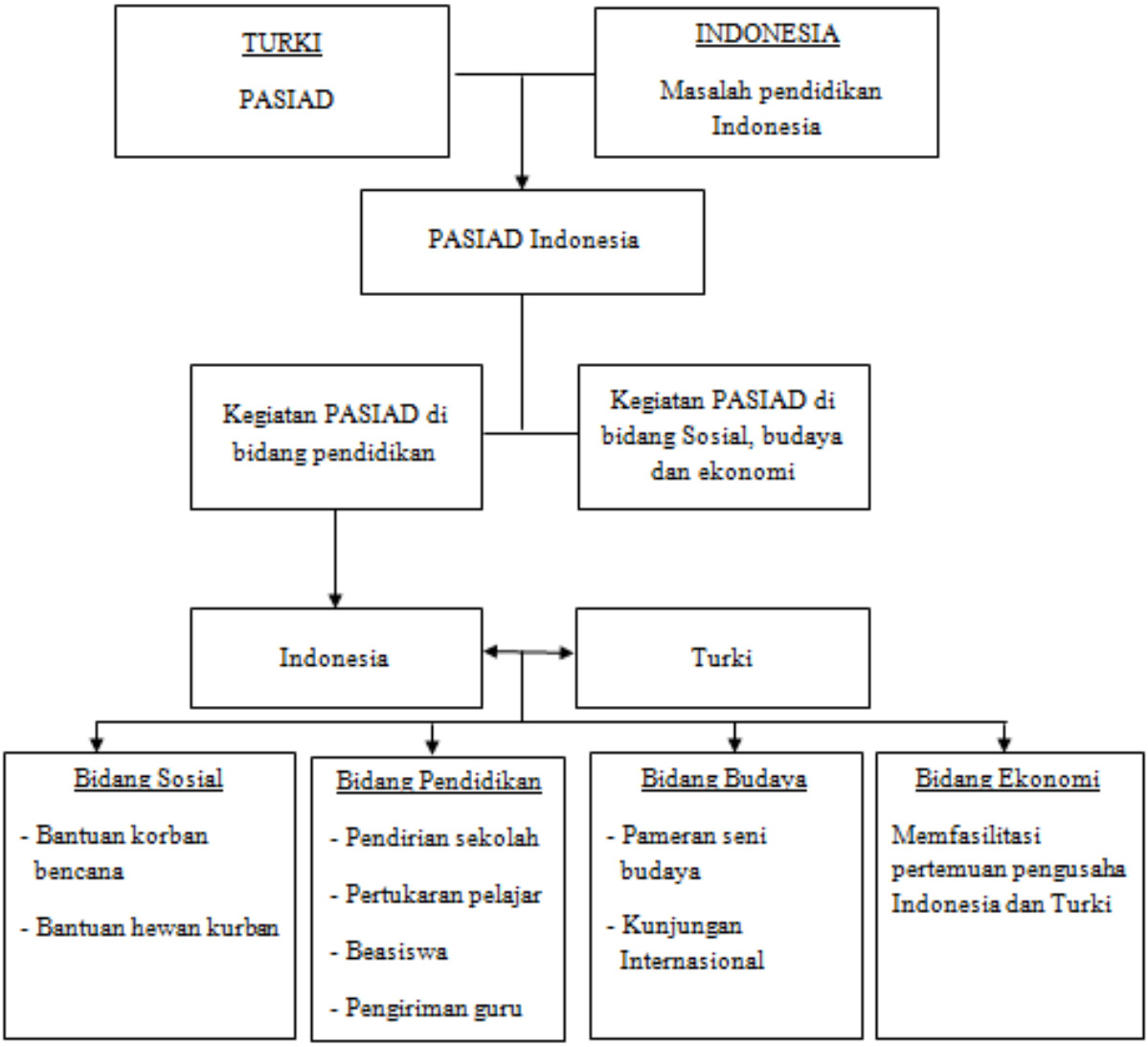
Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks, interaksi tidak hanya dilakukan antara negara saja melainkan juga aktor-aktor lain yang juga mempunyai peranan berpengaruh dalam hubungan internasional. Aktor-aktor lain tersebut salah satunya *InternationalNon-Governmental Organization* (INGO**),** Interaksi yang melintasi batas negara membuat batasan-batasan politik tidak lagi menjadi penghalang dalam hubungan internasional.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, sistem internasional tidak lagi fokus kepada isu-isu yang bersifat *high-politics* seperti keamanan, militer, perang dan

politik. Namun, mulai berangsur bergeser kepada isu *low-politics* seperti lingkungan hidup, ekonomi, Hak Asasi Manusia, terorisme termasuk isu pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan universal manusia merupakan kekuatan yang cukup netral dan efektif dalam mempengaruhi suatu bangsa terhadap gagasan atau imej tertentu dari suatu pihak. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan proses pembelajaran ilmu–ilmu yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, hal yang biasa terjadi adalah sikap penerimaan atas ilmu dan nilai–nilai sosial baik yang didapatkan secara langsung dari interaksi yang terjadi dengan masyarakat sekitar.

Pendidikan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara. Negara-negara di dunia berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya menghadirkan lembaga pendidikan asing. Dilihat dari perspektif perubahan kualitas pendidikan, lembaga pendidikan asing memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia.



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→ : Menunjukan arah aliran dari satu proses ke proses lainnya

↔ : Menunjukan adanya hubungan dua arah

□ : Menunjukan objek